

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 1 ayat (3) Amandemen ke-IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan dimasukkannya pasal ini ke dalam bagian dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara, bahwa Negara Indonesia adalah dan harus merupakan negara berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*). Sehingga konsekuensi yang timbul menyebabkan Indonesia memiliki aturan-aturan tertulis maupun yang tidak tertulis, yang digunakan untuk mengatur dan menciptakan ketertiban bagi masyarakatnya. Aturan-aturan yang dirumuskan kedalam bentuk peraturan dalam penegakannya diharapkan dapat memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Penegakkan atas hukum sendiri yang bertujuan untuk menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang kondusif dan dinamis tentunya tidak dapat dilepaskan dari kinerja aparatur penegak hukum. Aparatur penegak hukum merupakan motor penggerak teraktualisasinya hukum di tengah masyarakat sekaligus menjadi pelengkap bagi hukum acara pidana dimana masing-masing aparat memiliki tugas dan wewenang yang berbeda-beda. Hukum acara pidana yang dimaksud disini adalah hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiil, sehingga memperoleh keputusan Hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan (Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014: 4).

Hukum acara pidana di Indonesia juga telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Menurut Moch. Faisal Salam dalam bukunya Andi Sofyan dan Abd. Asis (2014: 11), tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran selengkap-lengkapya dari suatu

perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Terlaksananya tujuan tersebut, apabila jika masyarakat memiliki kesadaran untuk mentaati peraturan-peraturan yang ada. Hukum harus mampu menjaga agar yang lemah tidak dibiarkan menghadapi sendiri pihak yang kuat yang sudah pasti akan dimenangkan oleh yang kuat (Steven Suprantio, 2014: 48). Namun kenyataannya, masih banyak kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mentaati hukum, sehingga hukum yang dianggap melindungi pihak yang lemah tidak tercapai dan pelanggaran maupun tindak pidana yang sengaja atau tidak sengaja pun seringkali terjadi, termasuk tindak pidana korupsi.

Eksistensi korupsi di Indonesia dinilai bersifat *omnipotent* (hadir dimana-mana) mengakar pada seluruh sendi kehidupan bangsa. Berbagai pendapat menyatakan bahwa korupsi adalah persoalan moralitas *an sich*. Akan tetapi menurut John Girling yang dikutip dalam bukunya Dr. Drs. IGM Nurdjana, S.H., M.Hum., menyatakan bahwa sesungguhnya korupsi bukanlah semata-mata merupakan persoalan moral individual atau hanya persoalan suap-menyuap (*bribery*) maupun pemerasan (*extortion*), melainkan problem yang melekat dalam struktur politik dan ekonomi, sehingga dalam banyak hal, kehadiran struktur ekonomi-politik itu justru menyebabkan korupsi menjadi fungsional. Hal ini sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Lord Acton bahwa, “*Power Tends to Corrupt, but Absolute Power Corrupts Absolutely*” yang berarti kekuasaan cenderung disalahgunakan sehingga semakin besar kekuasaan yang digenggam, semakin besar pula peluang untuk disalahgunakan (IGM Nurdjana, 2010:116).

Perbuatan korupsi telah digolongkan sebagai kejahatan internasional karena telah ditetapkan melalui Konvensi Internasional (R. Atmasasmita, 2004: 40). Dalam

ratifikasi Konvensi Internasional pemberantasan korupsi, korupsi merupakan kejahatan transnasional dan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Instrumen hukum dalam pemberantasan korupsi boleh dikatakan telah cukup lengkap meskipun dalam praktiknya, penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi seolah masih sangat sulit bahkan stagnan.

Aturan mengenai korupsi di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tercantum dalam Bab II Pasal 2 yang dimaksud dengan korupsi adalah:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

Salah satu kasus tindak pidana korupsi yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah kasus korupsi secara bersama-sama dan berlanjut yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. Kasus Korupsi, dengan Terdakwa Drs. Budiono Iksan selaku Pegawai Negeri Sipil, Pangkat Penata (III/c), Jabatan Staf Dinas Pariwisata Kota Batu (Mantan Pj. Kabag Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batu tahun 2002 sampai dengan 2004) dan Herry Satmoko, S.Sos. selaku Pegawai Negeri Sipil, Pangkat Penata Tk. I (III/d), Jabatan Kepala Bagian TU pada Dinas Pariwisata Kota Batu (Mantan Pj. Kasubag Mutasi Kepegawaian pada Bagian Kepegawaian Sekretariat tahun 2002 sampai dengan 2004), yang kasusnya telah diputus dalam Putusan Nomor 1722K/Pid.Sus/2014.

Kasus ini berawal dari Para Terdakwa melakukan penyalahgunaan wewenang dengan melakukan rekayasa dalam proses kenaikan pangkat dan jabatan struktural PNS di lingkungan Pemerintah Kota Batu, terutama dalam kenaikan pangkat bagi para Pegawai Negeri Sipil agar nantinya dapat memenuhi syarat untuk mengisi kekosongan jabatan dengan mengesampingkan pedoman atau ketentuan kepegawaian yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor

12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat PNS. Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II mengakibatkan kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar Rp1.356.242.571,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah). Meskipun telah dikembalikan sebanyak Rp198.602.657,00 (seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah), berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan pengembalian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapus pidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Tanggal 7 November 2007, tuntutan pidana bagi para Terdakwa dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu dibacakan, yaitu tuntutan agar dijatuhinya hukuman masing-masing selama 4 (empat) tahun penjara, pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair masing-masing 3 (tiga) bulan kurungan dan membayar uang pengganti kerugian negara yang seluruhnya dikurangi kerugian negara yang telah dikembalikan yang telah disebutkan sebelumnya secara tanggung renteng terhadap para Terdakwa dengan ketentuan apabila para Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutup pidana pengganti tersebut.

Tanggal 19 Februari 2008, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang telah menerbitkan putusan nomor 279/Pid.B/2007/PN.Mlg. tanggal 19 Februari 2008 dengan Terdakwa I Drs. Budiono Iksan dan Terdakwa II Herry Satmoko, S.Sos. secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan menjatuhkan hukuman pidana

penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan terhadap masing-masing Terdakwa, yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusannya pada tanggal 25 Juni 2009 dengan nomor 340/Pid/2009/PT.SBY.

Selanjutnya atas dikabulkannya permohonan Kasasi yang diajukan Penuntut Umum, pada tanggal 4 September 2015, Mahkamah Agung Republik Indonesia memperberat hukuman kepada Terdakwa I Drs. Budiono Iksan dan Terdakwa II Herry Satmoko, S.Sos. dari 1 (satu) tahun menjadi 5 (lima) tahun penjara dan pidana denda dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan menjadi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Dengan adanya putusan Kasasi tersebut, maka telah mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*) dalam perkara korupsi atas nama Drs. Budiono Iksan sebagai Terdakwa I dan Herry Satmoko, S.Sos. sebagai Terdakwa II.

Lembaga Kasasi ini merupakan pengadilan negara tertinggi yang tugas utamanya ialah melakukan peradilan Kasasi di samping tugas-tugas lainnya dan yang dalam perkembangannya menjadi pemegang tunggal dari peradilan Kasasi dalam 4 (empat) tingkat lingkungan peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama dan Peradilan Administrasi (Tanusubroto, 1989: 149). Tidak jarang keputusan yang diambil Hakim yang berada di tingkat yang lebih rendah menimbulkan rasa tidak puas dan tidak memenuhi unsur keadilan bagi para pihak yang merasa dirugikan dalam perkara yang sedang disidangkan. Oleh karena itu, pihak-pihak yang berperkara dapat mengajukan upaya-upaya hukum Perlawanan, Banding, Kasasi bahkan Peninjauan Kembali. Prinsip demikian diselaraskan dengan asas yang dianut dalam hukum acara pidana yang biasa dikenal dengan asas '*equality before the law*' dimana semua orang sama di mata hukum. Sama halnya dalam kasus tindak pidana korupsi dengan Terdakwa I Drs. Budiono Iksan beserta Terdakwa II Herry Satmoko, S.Sos. putusan

Hakim yang dijatuhkan dianggap belum memenuhi unsur keadilan hingga akhirnya diperkarakan hingga ke Mahkamah Agung.

Sehubungan Terdakwa dengan penuntut Umum yang memiliki hak untuk mengajukan suatu upaya hukum terhadap putusan hakim, menurut tata cara yang diatur dalam Pasal 1 butir 12 KUHAP, tak terkecuali dalam upaya hukum Kasasi terhadap keberatan mengenai pidana uang pengganti yang diajukan Penuntut Umum. Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan peninjauan lebih dalam terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 1722K/PID.SUS/2014, dengan judul **“ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM KEBERATAN MENGENAI PIDANA UANG PENGGANTI DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERKARA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1722K/PID.SUS/2014)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mengambil beberapa permasalahan yang akan diuraikan dalam penelitian hukum ini. Adapun permasalahan yang akan dikaji, yaitu:

1. Apakah alasan Kasasi Penuntut Umum keberatan tidak diterapkan pidana uang pengganti dalam perkara korupsi secara bersama-sama dan berlanjut telah sesuai Pasal 253 KUHAP?
2. Apakah pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan alasan Kasasi Penuntut Umum dalam perkara korupsi secara bersama-sama dan berlanjut telah sesuai Pasal 256 KUHAP?

C. Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian hukum selayaknya memiliki tujuan, sebagai target yang hendak dicapai sebagai arah dari suatu penelitian dan diharapkan dapat memberikan manfaat serta mampu memberikan jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian hukum. Berdasarkan hal tersebut, tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Mengetahui alasan Kasasi Penuntut Umum keberatan tidak diterapkan pidana uang pengganti dalam perkara korupsi secara bersama-sama dan berlanjut telah sesuai dengan 253 KUHP.
 - b. Mengetahui pertimbangan hukum Mahkamah Agung memutus mengabulkan alasan Kasasi Penuntut Umum dalam perkara korupsi secara bersama-sama dan berlanjut telah sesuai dengan 256 KUHP.
2. Tujuan Subyektif
 - a. Memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam penyusunan penulisan hukum guna memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar Sarjana Strata 1 (S1) dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
 - b. Menambah ilmu pengetahuan serta pengaplikasiannya di bidang Hukum Acara Pidana melalui pemahaman aspek hukum dalam teori dan praktek lapangan hukum yang sangat bermanfaat bagi penulis sendiri pada khususnya dan akan memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, terutama bagi kemajuan hukum di Indonesia. Manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Manfaat Teoritis dan Manfaat Praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum terutama di bidang hukum acara pidana di Indonesia, khususnya terkait permasalahan dalam perkara korupsi.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menambah referensi, literatur dan bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk penelitian dan penulisan hukum sejenis di masa yang akan datang.
- c. Penelitian ini merupakan suatu pembelajaran dalam menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah diperoleh selama kuliah Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, sehingga dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan dokumentasi ilmiah.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti
- b. Mengembangkan penalaran dan logika berpikir, membentuk pola pikir yang dinamis, sekaligus menguji kemampuan meneliti dalam menerapkan kajian keilmuan sinkronisasi hukum
- c. Memberikan masukan dan tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini dan berguna bagi pihak-pihak yang berminat pada masalah yang sama.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 83). Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 60). Dalam suatu penelitian, metode penelitian merupakan suatu faktor penting yang menunjang proses

penyelesaian suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode merupakan cara utama yang akan digunakan untuk mencapai tingkat ketelitian jumlah dan jenis yang dihadapi akan tetapi dengan mengadakan klarifikasi yang didasarkan pada pengalaman dapat ditentukan jenis metode penelitian (Winarno Surachmad, 1982: 131).

Berdasarkan uraian di atas, untuk menjawab isu hukum yang dianalisis, diperlukan penggunaan metode penelitian yang mendukung dalam penulisan hukum ini. Berikut metode yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah jenis penelitian hukum normatif atau dikenal juga sebagai penelitian hukum doktrinal karena sebenarnya, menurut Peter Mahmud Marzuki, segala penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research* atau *rechtsonderzoek*) adalah selalu normatif (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 55-56). Maksud dari penelitian hukum normatif atau doktrinal itu sendiri adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan penelitian yang bersifat preskriptif dan terapan. Arti dari sifat preskriptif yaitu memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi tersebut dilakukan untuk memberikan preskriptif atau penelitian mengenai benar atau salah menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian dengan kajian objek hukum seperti koherensi antara norma hukum maupun koherensi antara tingkah laku individu dengan norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 41). Sementara arti dari sifat terapan yakni penelitian hukum dalam kerangka kegiatan akademis sekalipun harus melahirkan preskriptif yang dapat diterapkan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 69).

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum dimulai dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan hukum (*legal decision making*) terhadap kasus-kasus hukum yang konkret. Pada sisi lainnya, penelitian hukum juga merupakan kegiatan ilmiah untuk memberikan refleksi dan penilaian terhadap keputusan-keputusan hukum yang telah dibuat terhadap kasus-kasus hukum yang pernah terjadi.

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan Historis (*Historical Approach*), Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Perlu dipahami sebelumnya, *Ratio Decidendi* atau *Reasoning* adalah pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim untuk mencapai pada putusannya, baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis. *Ratio Decidendi* atau *Reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum. Pendekatan Kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 134). Digunakannya pendekatan kasus dalam penelitian hukum ini karena penulis melakukan telaah terhadap kasus Korupsi dengan Terdakwa Drs. Budiono Iksan dan Herry Satmoko, S.Sos., yang mana kasus tersebut berkaitan dengan isu yang diangkat dalam penelitian hukum ini, yaitu mengenai alasan pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum dengan keberatannya atas uang pidana pengganti dan pertimbangan Mahkamah Agung

memutus secara bersama-sama dan berlanjut terkait Perkara Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1722K/Pid.Sus/2014).

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Pemecahan isu hukum memerlukan sumber-sumber penelitian. Namun, di dalam penelitian hukum tidak mengenal istilah data, tetapi dikenal dengan istilah bahan hukum. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan Hakim. Sementara bahan hukum sekunder ialah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 181).

Sumber bahan hukum yang akan penulis gunakan dalam penelitian hukum ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang isinya mengikat secara yuridis karena dikeluarkan oleh Pemerintah berupa Undang-Undang dan peraturan lain di bawah Undang-Undang. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 5) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1722K/Pid.Sus/2014.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi:

- 1) Buku-buku ilmiah di bidang hukum
- 2) Makalah-makalah dan hasil-hasil karya ilmiah para sarjana
- 3) Jurnal-jurnal hukum
- 4) Kamus-kamus hukum
- 5) Literatur dan hasil penelitian lainnya

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan tahapan yang dilakukan penulis dalam mengolah bahan hukum yang telah diperoleh, yang nantinya akan dipergunakan untuk menjawab segala permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Studi Dokumen atau Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu pengumpulan bahan hukum dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, dokumen resmi maupun literatur-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas. Dari bahan hukum tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai bahan hukum penunjang di dalam penelitian ini. Selain itu, cara pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara deduksi atau menarik kesimpulan atas suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum merupakan tahapan dalam mengklasifikasi, menguraikan bahan hukum yang diperoleh untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diteliti. Teknik analisis bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode silogisme yang menggunakan pola berpikir

deduktif. Menurut Philips M. Hadjon dalam bukunya Peter Mahmud Marzuki (2014: 89-90), bahwasanya dalam logika silogistik untuk penalaran hukum yang merupakan premis mayor adalah aturan hukum sedangkan minornya adalah fakta hukum. Dari kedua hal tersebut kemudian ditarik suatu konklusi.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Memberikan gambaran yang lebih jelas, komprehensif dan menyeluruh mengenai materi penulisan hukum yang akan disusun, maka penulis menyusun sistematika penulisan hukum ini yang terdiri dari 4 (empat) bab. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tinjauan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan hukum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini penulis akan memuat landasan teori atau penjelasan secara teoritik yang bersumber pada bahan hukum yang penulis gunakan dan doktrin ilmu hukum yang dianut secara universal mengenai persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Landasan teori tersebut meliputi Tinjauan Umum tentang Upaya Hukum Kasasi, Tinjauan Umum tentang Penuntut Umum, Tinjauan Umum tentang Putusan, Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Putusan Hakim, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana yang Dilakukan Secara Bersama-sama dan Tindak Pidana Berkelanjutan serta Tinjauan Umum tentang Pidana Uang Pengganti. Selain untuk mempermudah alur berpikir disertakan juga Kerangka Berpikir yang dilampirkan pada Bab ini.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini penulis akan menyajikan dan menguraikan pembahasan berdasarkan rumusan masalah yang ada, yaitu mengenai alasan pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum keberatan atas pidana uang pengganti sesuai dengan ketentuan KUHAP dan pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung dalam memutus mengabulkan permohonan Kasasi dalam perkara korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sesuai dengan KUHAP.

BAB IV PENUTUP

Bab ini penulis akan menguraikan mengenai simpulan yang didapat dari keseluruhan hasil pembahasan serta saran yang relevan sebagai sarana evaluasi.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

